



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-

Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal, selanjutnya disingkat dengan BHPDM dan BHRDM dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari.
8. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional, selanjutnya disingkat dengan BHPDP dan BHRDP dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.536.097.205.60 (Empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah enam puluh sen).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari dihitung berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :
 - a. Azas merata adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut BPPDM dan BHRDM; dan

- b. Azas adil adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Nagari Proporsional.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP dalam Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah :

- a. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
- b. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$AF \text{ Nagari} = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4) \times \text{Nagari}$
Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dimasukan dalam APB Nagari tahun yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN dilaksanakan setiap akhir Semester.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN Semester II (dua), paling lambat bulan November tahun berjalan.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai APB Nagari.

BAB V

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB VI

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan APB Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4); dan
 - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah (Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) atau Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 191

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 191 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa				Total
			Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-7
1	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	13.813.000,00	2.497.500,00	16.336.474	32.646.974,00
2		MUARO SAKAI INDERAPURA	14.356.000,00	2.595.700,00	6.261.628	23.213.328,00
3		TIGA SEPAKAT INDERAPURA	12.574.400,00	2.273.500,00	4.777.600	19.625.500,00
4		INDERAPURA BARAT	11.946.000,00	2.159.900,00	2.273.524	16.379.424,00
5		KUDO-KUDO INDERAPURA	14.070.100,00	2.544.000,00	6.723.623	23.337.723,00
6		INDERAPURA SELATAN	13.047.500,00	2.359.100,00	6.539.607	21.946.207,00
7		SIMPANG LAMA INDERAPURA	12.864.300,00	2.325.900,00	10.045.438	25.235.638,00
8		TIGO SUNGAI INDERAPURA	12.257.800,00	2.216.300,00	9.433.445	23.907.545,00
9		TLUK AMPLU INDERAPURA	11.902.800,00	2.152.100,00	10.861.504	24.916.404,00
10		INDERAPURA TENGAH	13.924.600,00	2.517.700,00	3.767.957	20.210.257,00
11	RANAH PESISIR	PELANGAI	12.741.300,00	2.303.700,00	15.560.375	30.605.375,00
12		SUNGAI TUNU	13.683.900,00	2.474.100,00	13.354.261	29.512.261,00
13		SUNGAI TUNU UTARA	15.987.100,00	2.890.600,00	16.517.430	35.395.130,00
14		SUNGAI TUNU BARAT	13.948.600,00	2.522.000,00	20.160.298	36.630.898,00
15		NYIUR MELAMBAI PELANGAI	14.648.300,00	2.648.500,00	24.736.354	42.033.154,00
16		SUNGAI LIKU PELANGAI	16.549.700,00	2.992.300,00	15.933.739	35.475.739,00
17		KOTO VIII PELANGAI	15.246.400,00	2.756.700,00	20.160.295	38.163.395,00
18		PELANGAI GADANG	13.083.600,00	2.365.600,00	9.942.351	25.391.551,00
19		PELANGAI KACIAK	13.076.400,00	2.364.300,00	10.808.875	26.249.575,00
20		PASIA PELANGAI	14.469.100,00	2.616.100,00	20.414.024	37.499.224,00
21	LENGAYANG	KAMBANG	18.740.400,00	3.388.400,00	32.534.424	54.663.224,00
22		LAKITAN	15.178.200,00	2.744.300,00	16.572.768	34.495.268,00
23		KAMBANG UTARA	20.364.700,00	3.682.100,00	43.966.545	68.013.345,00
24		KAMBANG TIMUR	18.991.500,00	3.433.800,00	18.019.655	40.444.955,00
25		KAMBANG BARAT	18.662.900,00	3.374.400,00	34.732.914	56.770.214,00
26		LAKITAN UTARA	16.169.400,00	2.923.500,00	18.063.387	37.156.287,00
27		LAKITAN SELATAN	18.222.500,00	3.294.700,00	16.210.091	37.727.291,00
28		LAKITAN TIMUR	13.070.600,00	2.363.200,00	6.878.496	22.312.296,00
29		LAKITAN TENGAH	14.940.100,00	2.701.300,00	11.655.215	29.296.615,00
30	BATANG KAPAS	IV KOTO HILIE	19.202.300,00	3.471.900,00	28.391.591	51.065.791,00
31		IV KOTO MUDIEK	12.936.900,00	2.339.100,00	10.303.390	25.579.390,00
32		TALUAK	13.060.700,00	2.361.500,00	7.230.098	22.652.298,00
33		KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	17.689.500,00	3.198.400,00	13.075.109	33.963.009,00
34		KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	14.609.000,00	2.641.400,00	8.318.829	25.569.229,00
35		TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	14.538.100,00	2.628.600,00	4.141.232	21.307.932,00
36		TUIK IV KOTO MUDIEK	12.997.400,00	2.350.000,00	9.565.309	24.912.709,00
37		SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	14.142.700,00	2.557.100,00	9.341.561	26.041.361,00
38		TALUK TIGO SAKATO	12.680.700,00	2.292.800,00	9.315.152	24.288.652,00
39	URAI	PAINAN	12.336.000,00	2.230.400,00	35.376.933	49.943.333,00
40		TAMBANG	13.173.000,00	2.381.800,00	3.563.106	19.117.906,00
41		SALIDO	16.193.300,00	2.927.900,00	28.813.475	47.934.675,00
42		LUMPO	11.829.800,00	2.138.900,00	3.245.209	17.213.909,00
43		BUNGA PASANG SALIDO	15.352.300,00	2.775.800,00	10.602.446	28.730.546,00
44		SAGO SALIDO	13.779.700,00	2.491.500,00	29.438.009	45.709.209,00
45		SALIDO SARI BULAN	13.579.800,00	2.455.300,00	3.289.903	19.325.003,00
46		KOTO RAWANG	12.925.800,00	2.337.100,00	2.567.219	17.830.119,00
47		LIMAU GADANG LUMPO	13.419.900,00	2.426.400,00	2.208.674	18.054.974,00
48		BATU KUNIK LUMPO	11.871.700,00	2.146.500,00	2.525.976	16.544.176,00

No.	Kecamatan	Nama Desa				Total
			Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	
49	IV J	TARATAK TANGAH LUMPO	13.478.800,00	2.437.100,00	3.083.084	18.998.984,00
50		AMPUAN LUMPO	12.007.900,00	2.171.100,00	1.926.336	16.105.336,00
51		AMPANG TAREH LUMPO	12.249.500,00	2.214.800,00	2.734.782	17.199.082,00
52		BALAI SINAYAN LUMPO	11.942.900,00	2.159.300,00	2.590.020	16.692.220,00
53		SUNGAI GAYO LUMPO	11.541.500,00	2.086.800,00	2.516.877	16.145.177,00
54		SUNGAI SARIAK LUMPO	11.904.400,00	2.152.400,00	1.707.390	15.764.190,00
55		BUKIK KACIAK LUMPO	12.014.500,00	2.172.300,00	2.776.321	16.963.121,00
56		GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	12.372.100,00	2.237.000,00	1.324.210	15.933.310,00
57		PAINAN SELATAN PAINAN	13.251.300,00	2.395.900,00	22.270.837	37.918.037,00
58		PAINAN TIMUR PAINAN	13.786.900,00	2.492.800,00	19.712.441	35.992.141,00
59	BAYANG	KOTO BERAPAK	12.497.600,00	2.259.700,00	6.565.479	21.322.779,00
60		TALAOK	15.240.500,00	2.755.600,00	4.603.134	22.599.234,00
61		PASAR BARU	14.788.800,00	2.673.900,00	6.453.308	23.916.008,00
62		GURUN PANJANG	12.423.200,00	2.246.200,00	5.280.029	19.949.429,00
63		API-API PASAR BARU	13.163.000,00	2.379.900,00	3.802.474	19.345.374,00
64		TANJUNG DURIAN PASAR BARU	13.265.300,00	2.398.500,00	3.459.975	19.123.775,00
65		ASAM KAMBA PASAR BARU	14.126.200,00	2.554.100,00	4.222.153	20.902.453,00
66		SAWAH LAWEH PASAR BARU	14.369.400,00	2.598.100,00	7.208.198	24.175.698,00
67		KAPEH PANJI JAYA TALAOK	14.527.800,00	2.626.700,00	4.507.722	21.662.222,00
68		AUR BEGALUNG TALAOK	13.452.800,00	2.432.400,00	6.378.723	22.263.923,00
69		KAPELGAM KOTO BERAPAK	13.716.300,00	2.480.000,00	5.199.144	21.395.444,00
70		KOTO BARU KOTO BERAPAK	13.439.200,00	2.429.900,00	3.100.201	18.969.301,00
71		KUBANG KOTO BERAPAK	12.317.600,00	2.227.100,00	6.404.599	20.949.299,00
72		KAPUJAN KOTO BERAPAK	13.979.100,00	2.527.500,00	3.984.448	20.491.048,00
73		GURUN PANJANG UTARA	15.111.100,00	2.732.200,00	7.257.561	25.100.861,00
74		GURUN PANJANG BARAT	12.224.700,00	2.210.300,00	3.619.473	18.054.473,00
75		GURUN PANJANG SELATAN	12.881.200,00	2.329.000,00	5.517.044	20.727.244,00
76	KOTO XI TARUSAN	SIGUNTUR	13.855.200,00	2.505.100,00	5.975.137	22.335.437,00
77		SUNGAI PINANG	14.601.000,00	2.640.000,00	2.277.175	19.518.175,00
78		DUKU	19.431.800,00	3.513.400,00	8.364.101	31.309.301,00
79		BATU HAMPA	14.443.200,00	2.611.400,00	5.549.193	22.603.793,00
80		NANGGALO	13.926.300,00	2.518.000,00	7.041.784	23.486.084,00
81		AMPANG PULAI	14.459.300,00	2.614.300,00	6.764.855	23.838.455,00
82		KAPUH	17.263.700,00	3.121.400,00	7.772.850	28.157.950,00
83		BARUNG-BARUNG BALANTAI	12.488.500,00	2.258.000,00	10.851.584	25.598.084,00
84		BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	12.280.300,00	2.220.300,00	5.368.880	19.869.480,00
85		MANDEH	14.801.800,00	2.676.300,00	4.468.500	21.946.600,00
86		KAPUAH UTARA	13.405.600,00	2.423.800,00	2.933.446	18.762.846,00
87		TARATAK SUNGAI LUNDANG	15.223.400,00	2.752.500,00	1.908.683	19.884.583,00
88		SIGUNTUR TUA	12.011.600,00	2.171.800,00	1.327.740	15.511.140,00
89		KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	15.050.300,00	2.721.200,00	3.589.325	21.360.825,00
90		DUKU UTARA	13.538.000,00	2.447.800,00	7.192.940	23.178.740,00
91		PULAU KARAM AMPANG PULAI	13.855.800,00	2.505.200,00	3.318.242	19.679.242,00
92		JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI	13.952.700,00	2.522.700,00	3.700.337	20.175.737,00
93		CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	12.052.500,00	2.179.200,00	3.918.940	18.150.640,00
94		SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	12.941.800,00	2.340.000,00	11.161.146	26.442.946,00
95		BATU HAMPAR SELATAN	14.426.200,00	2.608.400,00	2.340.610	19.375.210,00
96		BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	13.228.400,00	2.391.800,00	2.822.178	18.442.378,00
97		BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	12.370.500,00	2.236.700,00	4.186.620	18.793.820,00
98		SETARA NANGGALO	14.284.800,00	2.582.800,00	9.382.925	26.250.525,00
99	UTERA	TARATAK	14.306.000,00	2.586.600,00	6.347.760	23.240.360,00
100		SURANTIH	17.677.200,00	3.196.200,00	16.680.139	37.553.539,00
101		AMPING PARAK	20.850.500,00	3.769.900,00	35.111.444	59.731.844,00
102		AMPING PARAK TIMUR	15.806.600,00	2.857.900,00	20.426.058	39.090.558,00
103		KOTO TARATAK	12.575.300,00	2.273.700,00	6.697.069	21.546.069,00
104		LANSANO TARATAK	14.289.900,00	2.583.700,00	5.620.143	22.493.743,00
105		AUR DURI SURANTIH	17.182.300,00	3.106.700,00	11.490.405	31.779.405,00

No.	Kecamatan	Nama Desa				Total
			Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	
106	S	RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH	16.512.000,00	2.985.500,00	7.528.704	27.026.204,00
107		KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	15.269.500,00	2.760.800,00	10.261.017	28.291.317,00
108		KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	14.149.300,00	2.558.300,00	6.688.176	23.395.776,00
109		GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH	13.456.100,00	2.433.000,00	8.393.967	24.283.067,00
110		GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	17.765.300,00	3.212.100,00	3.796.346	24.773.746,00
111	LINGGO SARI BAGANTI	PUNGGASAN	12.597.400,00	2.277.700,00	5.219.752	20.094.852,00
112		AIR HAJI	12.985.500,00	2.347.900,00	9.135.186	24.468.586,00
113		PUNGGASAN UTARA	15.224.500,00	2.752.700,00	12.848.616	30.825.816,00
114		PUNGGASAN TIMUR	14.370.300,00	2.598.300,00	8.822.318	25.790.918,00
115		PADANG XI PUNGGASAN	14.732.400,00	2.663.700,00	7.821.560	25.217.660,00
116		LAGAN MUDIK PUNGGASAN	12.131.300,00	2.193.400,00	5.187.177	19.511.877,00
117		LAGAN HILIR PUNGGASAN	13.106.600,00	2.369.800,00	9.690.206	25.166.606,00
118		AIR HAJI TENGGARA	16.224.600,00	2.933.500,00	7.107.171	26.265.271,00
119		PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	14.187.600,00	2.565.200,00	6.780.710	23.533.510,00
120		PASAR BUKIT AIR HAJI	13.973.100,00	2.526.400,00	6.205.034	22.704.534,00
121		AIR HAJI BARAT	13.411.500,00	2.424.900,00	4.945.872	20.782.272,00
122		AIR HAJI TENGAH	14.841.400,00	2.683.400,00	6.511.032	24.035.832,00
123		RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	14.077.900,00	2.545.400,00	10.166.519	26.789.819,00
124		MUARA GADANG AIR HAJI	13.752.300,00	2.486.500,00	3.835.276	20.074.076,00
125		SUNGAI SIRAH AIR HAJI	12.987.500,00	2.348.200,00	4.655.007	19.990.707,00
126		MUARA KANDIS PUNGGASAN	12.835.700,00	2.320.800,00	2.768.287	17.924.787,00
127	LUNANG	LUNANG	14.573.300,00	2.634.900,00	9.011.332	26.219.532,00
128		LUNANG UTARA	13.168.100,00	2.380.900,00	2.505.620	18.054.620,00
129		LUNANG SELATAN	11.883.500,00	2.148.600,00	12.586.058	26.618.158,00
130		LUNANG BARAT	11.530.000,00	2.084.700,00	9.635.774	23.250.474,00
131		SINDANG LUNANG	11.664.100,00	2.108.900,00	15.925.627	29.698.627,00
132		PONDOK PARIAN LUNANG	11.357.800,00	2.053.600,00	3.990.920	17.402.320,00
133		LUNANG TENGAH	12.335.600,00	2.230.400,00	2.797.266	17.363.266,00
134		LUNANG SATU	11.723.800,00	2.119.700,00	7.336.908	21.180.408,00
135		LUNANG DUA	12.377.900,00	2.238.000,00	22.758.682	37.374.582,00
136		LUNANG TIGA	11.510.200,00	2.081.100,00	21.588.050	35.179.350,00
137	BASA AMPEK BALAI TAPAN	TAPAN	12.506.300,00	2.261.200,00	1.741.431	16.508.931,00
138		PASAR TAPAN	10.958.100,00	1.981.300,00	5.077.867	18.017.267,00
139		BATANG ARAH TAPAN	12.648.500,00	2.286.900,00	3.246.119	18.181.519,00
140		AMPANG TULAK TAPAN	12.070.200,00	2.182.400,00	4.142.553	18.395.153,00
141		TANJUNG PONDOK TAPAN	12.837.900,00	2.321.200,00	4.182.247	19.341.347,00
142		BATANG BETUNG TAPAN	11.575.600,00	2.092.900,00	4.605.515	18.274.015,00
143		BUKIT BUAI TAPAN	11.634.000,00	2.103.500,00	3.327.300	17.064.800,00
144		RIAK DANAU TAPAN	12.908.300,00	2.333.900,00	4.739.786	19.981.986,00
145		KOTO ANAU TAPAN	11.956.200,00	2.161.800,00	1.867.627	15.985.627,00
146		DUSUN BARU TAPAN	11.803.200,00	2.134.100,00	1.809.352	15.746.652,00
147	AMPEK NAGARI BAYANG UTARA	PULUIK-PULUIK	15.551.000,00	2.811.700,00	3.678.375	22.041.075,00
148		KOTO RANAH	12.500.900,00	2.260.200,00	3.186.730	17.947.830,00
149		MUARO AIE	11.727.700,00	2.120.400,00	1.796.854	15.644.954,00
150		PANCUANG TABA	13.469.500,00	2.435.400,00	3.356.084	19.260.984,00
151		PULUIK-PULUIK SELATAN	13.986.300,00	2.528.800,00	4.289.499	20.804.599,00
152		LIMAU GADANG PANCUNG TABA	14.377.400,00	2.599.500,00	1.870.400	18.847.300,00
153	AIRPURA	INDERAPURA UTARA	12.143.400,00	2.195.600,00	9.349.828	23.688.828,00
154		MUARA INDERAPURA	11.845.000,00	2.141.700,00	9.832.371	23.819.071,00
155		DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	11.965.300,00	2.163.400,00	8.446.815	22.575.515,00
156		LALANG PANJANG INDERAPURA	11.361.300,00	2.054.200,00	11.771.991	25.187.491,00
157		PALOKAN INDERAPURA	12.930.100,00	2.337.800,00	8.495.365	23.763.265,00
158		LUBUK BETUNG INDERAPURA	12.383.400,00	2.239.000,00	3.373.817	17.996.217,00
159		TLUK KUALO INDERAPURA	13.234.700,00	2.392.900,00	4.757.648	20.385.248,00
160		TANAH BAKALI INDERAPURA	12.714.400,00	2.298.800,00	11.426.130	26.439.330,00
161		INDERAPURA TIMUR	13.226.200,00	2.391.400,00	7.123.358	22.740.958,00
162		PULAU RAJO INDERAPURA	12.346.200,00	2.232.300,00	3.127.422	17.705.922,00

No.	Kecamatan	Nama Desa				Total
			Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	
163	RANAH AMPEK HULU TAPAN	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	12.063.200,00	2.181.100,00	3.539.929	17.784.229,00
164		LIMAU PURUT TAPAN	12.318.800,00	2.227.300,00	3.829.060	18.375.160,00
165		TALANG BALARIK TAPAN	15.399.700,00	2.784.400,00	4.379.154	22.563.254,00
166		TEBING TINGGI TAPAN	13.083.800,00	2.365.600,00	4.031.618	19.481.018,00
167		BINJAI TAPAN	11.807.500,00	2.134.900,00	3.821.665	17.764.065,00
168		SUNGAI PINANG TAPAN	13.303.600,00	2.405.400,00	3.557.868	19.266.868,00
169		TALANG KOTO PULAI TAPAN	12.617.400,00	2.281.300,00	3.261.840	18.160.540,00
170		KAMPUNG TENGAH TAPAN	12.453.700,00	2.251.700,00	5.463.734	20.169.134,00
171		KUBU TAPAN	12.204.900,00	2.206.700,00	3.611.573	18.023.173,00
172		SIMPANG GUNUNG TAPAN	12.644.600,00	2.286.200,00	3.615.342	18.546.142,00
173	SILAUT	SILAUT	14.750.600,00	2.667.000,00	12.615.912	30.033.512,00
174		SUNGAI SIRAH	12.397.600,00	2.241.600,00	12.141.344	26.780.544,00
175		SUNGAI SARIK	11.940.000,00	2.158.800,00	12.725.854	26.824.654,00
176		SUNGAI PULAI	12.615.600,00	2.281.000,00	16.796.012	31.692.612,00
177		PASIR BINJAI	11.654.600,00	2.107.200,00	11.713.558	25.475.358,00
178		TALANG BINJAI	11.648.300,00	2.106.100,00	11.446.684	25.201.084,00
179		DURIAN SERIBU	11.937.700,00	2.158.400,00	22.896.989	36.993.089,00
180		LUBUK BUNTA	11.392.900,00	2.059.900,00	13.671.270	27.124.070,00
181		AIR HITAM	12.193.100,00	2.204.600,00	17.351.882	31.749.582,00
182		SAMBUNGO	12.056.244,90	2.178.975,00	6.412.754	20.647.973,60
Total			2.485.364.944,90	449.369.875,00	1.601.362.385,70	4.536.097.205,60

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR